

ANALISIS PROSES KADERISASI PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN GARUT

Miman Nurdiaman¹⁾; Sartibi Bin Hasyim²⁾; R. Ade Purnawan³⁾; Kalamullah⁴⁾

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut

mimannurdiaman123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kaderisasi yang dilaksanakan di PDI Perjuangan Kabupaten Garut dan mengetahui faktor penghambat proses kaderisasi pada PDI Perjuangan Kabupaten Garut.

Berdasarkan temuan peneliti di lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan kaderisasi lapangan yaitu keterbatasan sumberdaya Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis. Keterbatasan sumberdaya tersebut yaitu tidak adanya rencana tindak lanjut paska pelaksanaan kaderisasi kelas untuk membentuk tim monitoring kaderisasi lapangan, Badiklat hanya menyampaikan bahan materi kaderisasi lapangan kepada peserta kaderisasi sehingga peserta bersikap acuh tak acuh untuk melaksanakan tugas kaderisasi lapangan, kaderisasi lapangan tersebut seyogyanya dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan secara intensif dan terinci terhadap proses Kaderisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Garut. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Tahap Memasuki Lokasi Penelitian (getting in), (2) Tahap ketika berada di lokasi Penelitian (getting along), (3) Tahap Pengumpulan Data (logging the data) dalam tahap ini menggunakan dua tahap pengumpulan data yaitu (1) Wawancara Mendalam (in-dept interview), (2) Studi Dokumentasi.

Kata Kunci: Kaderisasi, Partai, Politik

1. Pendahuluan

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran yang sangat *vital*, salah satunya adalah mempersiapkan pemimpin nasional. Atas dasar tersebut, partai politik sangat dituntut untuk memiliki mekanisme kaderisasi yang baik.

Kaderisasi merupakan bentuk upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Fungsi dari kaderisasi ini juga dapat mempersiapkan atau mencetak calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi untuk menjadi pemimpin di masa depan yang siap dalam menjalankan organisasinya. Maka dari proses kaderisasi ini dapat melahirkan seorang kader, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kaderisasi adalah nyawa dari organisasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai salah satu partai besar di Indonesia (partai politik pemenang Pemilu tahun 1999 dan Pemilu 2014). PDI Perjuangan dipandang memiliki cara dan sistem dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang baik, hal tersebut ditandai dengan terbitnya aturan khusus tentang kaderisasi yang tertuang dalam Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres IV di Bali pada tahun 2015 dan Peraturan Partai (PO) PDI Perjuangan No. 09 Tahun 2015, tentang Kader Partai dan Kaderisasi Partai. Berdasarkan pedoman tersebut, sistem kaderisasi dibagi pada dua bagian, yaitu :

- a. Kaderisasi Berjenjang
 - 1) Kaderisasi Kader Pratama
Kaderisasi Kader Pratama (KKP) adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai pada tingkat kabupaten/kota atau tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
 - 2) Kaderisasi Tingkat Madya
Kaderisasi Kader Madya (KKM) adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai pada tingkat provinsi atau tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
 - 3) Kaderisasi Tingkat Utama
Kaderisasi Kader Utama adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

- b. Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai
Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai adalah pendidikan kader yang bersifat khusus, yang didirikan hanya ditingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai.
 - 1) Sekolah Partai ditujukan untuk :
 - (a) Anggota Partai;
 - (b) Kader Partai;
 - (c) Calon Menteri;
 - (d) Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - (e) Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - (f) Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.
 - 2) Sekolah Kader Partai adalah pendidikan kader lanjutan ditujukan kepada Kader Utama Partai yang bertujuan untuk :
 - (a) Membentuk kader Partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat;
 - (b) Mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin Partai, bangsa, dan negara; dan
 - (c) Menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Melihat pada sistem kaderisasi tersebut, peneliti memandang bahwa PDI Perjuangan memiliki infrastruktur kaderisasi yang baik. Namun, peneliti masih ingin mendalami lebih jauh pelaksanaan sistem kaderisasi tersebut di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, yang mana pada tingkatan partai di tingkat DPC sesuai AD/ART dan Pedoman Organisasi PDI Perjuangan dilaksanakan Kaderisasi Kader Pratama (KKP) yang merupakan tahap dasar dari pelaksanaan kaderisasi partai.

Kaderisasi Kader Pratama (KKP) adalah bagian dari tahapan kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan mengandung misi partai yaitu: *pertama*, misi eksternal yaitu sebagai ajang pendidikan politik untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat dan *kedua*, misi internal yaitu untuk mempertahankan eksistensi partai dalam upaya memenangkan atau mempertahankan kekuasaan pada setiap pelaksanaan Pemilu.

2. Studi Pustaka

Partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (Sukarna, 2008). Kemudian menurut Budiarto (2008), partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimi.

Koirudin (2004) mendefinisikan kaderisasi sebagai proses penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi orang secara lebih bagus. Dalam pengkaderan terdapat dua persoalan penting, yaitu :

- a. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan para pengurusnya memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif di bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Ini semua harus dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan partai.
- b. Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, terutama pada kaum muda. Kaum muda akan menjadi sasaran yang efektif untuk menjadi sasaran pengkaderan untuk dijadikan terdidik dan berkualitas.

Kaderisasi yang baik memiliki beberapa jenjang yang diperuntukan bagi para kadernya. Klasifikasi jenjang kaderisasi adalah jenjang pertama yang diperuntukkan bagi kader pemula, jenjang kedua yang diperuntukkan bagi kader madya dan jenjang ketiga yang diperuntukkan bagi calon-calon politisi (Harun, 2006). Proses kaderisasi yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan suatu pembinaan terhadap seseorang yang bertujuan agar seseorang itu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka memberi pelatihan serta bimbingan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki seseorang, yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suryani (2018) bahwa substansi pendidikan politik meliputi; Pertama, pengetahuan yang terdiri dari pengalaman profesional dan pengetahuan praktikal. Kedua, keterampilan yang terdiri dari keterampilan intelaktual, keterampilan tindakan, keterampilan komunikasi. Ketiga, sikap dan nilai-nilai prosedural, kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang tercermin dalam pendidikan politiknya merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dengan sengaja oleh partai politik dalam rangka melakukan regenerasi dengan baik.

Pelaksanaan teknis kaderisasi dilaksanakan oleh sebuah badan khusus yang bernama Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), ditingkat DPD Partai badan tersebut disebut Badiklatda, dan ditingkat DPC disebut dengan Badiklatcab.

3. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan secara intensif dan terinci terhadap proses Kaderisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Garut. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Tahap Memasuki Lokasi Penelitian (*getting in*), (2) Tahap ketika berada di lokasi Penelitian (*getting along*), (3) Tahap Pengumpulan Data (*logging the data*) dalam tahap ini menggunakan dua tahap pengumpulan data yaitu (1) Wawancara Mendalam (*in-dept interview*), (2) Studi Dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Ibu Megawati Soekarnoputri dalam Pidato Pembukaan Kongres III PDI Perjuangan tegas menyatakan, "... perjuangan tidak akan pernah sampai ke akhir tujuannya hanya dengan ideologi. Perjuangan takkan pernah mencapai terminalnya hanya dengan retorika belaka. Untuk bisa bekerja efektif, ideologi membutuhkan kader. Ideologi membutuhkan pemimpin, Ideologi membutuhkan aturan bermain. Ideologi membutuhkan kebijakan. Ideologi membutuhkan program yang merakyat. Ideologi membutuhkan sumber daya".

Kader adalah sumber daya penting; semua kader dituntut siap dan mampu menjadi kader militan, yaitu:

- a. Kader dengan kualitas baru;
- b. Kader yang mampu mengubah diri;
- c. Kader yang melengkapi diri dengan senjata ideologi, disertai kesadaran politik yang tinggi dan keterampilan organisasi yang baik, serta komitmen yang terjaga, terutama untuk bekerja di tengah massa;
- d. Kader yang dapat dengan jernih membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak, kepentingan partai, bangsa dan negara;

- e. Kader yang mengedepankan kepentingan jangka panjang, khususnya untuk memperkuat basis dan memperhebat kerja-kerja partai di tengah rakyat.

Anggaran Dasar PDI Perjuangan menyatakan, bahwa salah satu arti dan fungsi partai adalah wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (Bab III Pasal 6 huruf e, dan ditegaskan pula dalam pasal 9 c, AD/ART Partai).

Sesuai amanah Kongres IV di Bali, yang selanjutnya dituangkan dalam AD/ART dan Piagam Perjuangan PDI Perjuangan pasal 15, bahwa kader partai adalah anggota partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas dan pengabdianya kepada partai dan masyarakat umum. Pada ayat selanjutnya disebutkan, bahwa jenjang kader partai adalah:

- 1) Kader Pratama
- 2) Kader Madya
- 3) Kader Utama

Secara teknis pelaksanaan Kaderisasi PDI Perjuangan dikelola oleh sebuah badan yang khusus mengelola kaderisasi yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat). Badiklat adalah sebuah badan yang melakukan riset pada bidang kaderisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan serta peningkatan sumberdaya manusia di PDI Perjuangan.

- 1) Jenjang kaderisasi PDI Perjuangan dilaksanakan oleh partai sesuai dengan tingkatannya, yaitu :
 - 2) Kaderisasi Kader Pratama (KKP) dilaksanakan oleh DPC.
 - 3) Kaderisasi Kader Madya (KKM) dilaksanakan oleh DPD.
 - 4) Kaderisasi Kader Utama (KKU) dilaksanakan oleh DPP.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka peneliti melakukan pendalaman materi penelitian pada wilayah kaderisasi di tingkat DPC yaitu Kaderisasi Kader Pratama.

Kaderisasi Kader Pratama (KKP) dilaksanakan oleh DPC Partai melalui Badiklat partai tingkat DPC, sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. Dengan pentahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Tahap Rekrutmen
Tahapan ini adalah proses penarikan calon peserta kader yang diundang dari internal partai yaitu anggota dan pengurus, dan juga dari eksternal partai yaitu simpatisan/masyarakat umum.
- b. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan pendidikan mencakup pembelajaran kelas dan penugasan lapangan.
- c. Pembelajaran Kelas
- d. Materi-materi pokok yang menjadi wajib pada kegiatan kaderisasi pratama ini, meliputi:
 - (a) Pemahaman Ideologi, terutama mencakup Pancasila 1 Juni 1945, Pidato Nawaksara dan Pidato Ketua Umum dalam Pembukaan Kongres III , Bali 2010.
 - (b) AD/ART Partai, Program partai dan pemenangan pemilu.
 - (c) Metode berpikir Bung Karno/Analisa kritis.
 - (d) Pengorganisasian; strategi membangun gerakan koperasi.
 - (e) Transformasi sosial budaya Pancasila; strategi kebudayaan.
 - (f) Analisa sosial, pemetaan isu dan aktor lokal.
 - (g) Pendalaman materi pokok.
 - (h) Penulisan laporan.
 - (i) Refleksi dan pengalaman lapangan
 - (j) Kunjungan lapangan terbatas (2 hari).
 - (k) Tugas-tugas lapangan (6 bulan).

Pelaksanaan KKP pada pembelajaran kelas dilaksanakan selama 4 (empat) hari.

- c. Tugas Lapangan

Penugasan Lapangan dilakukan selama 6 (enam) bulan yang berfokus pada praktek pemahaman ideologi dalam analisis masalah dasar rakyat. Dalam kegiatan ini peserta fokus pada 3 (tiga) aspek berikut:

- (a) Pemetaan masalah sosial dan politik;
- (b) Tugas penyelesaian masalah dasar rakyat secara konkrit. (dalam enam bulan penugasan setidaknya menyelesaikan 10 Soal problem rakyat).
- (c) Pengorganisasian masyarakat fokus pada level ranting/desa.

Gambaran proses sistem kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut dapat terlihat dari sikap, pemahaman secara keilmuan atau mental para peserta kader setelah mengikuti pendidikan kader, maka tidak heran jika pengurus DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan Kabupaten Garut memiliki militansi dan loyalitas yang tinggi terhadap partainya.

Faktor Penghambat Proses Kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Garut

Kualitas kaderisasi pada dasarnya mempengaruhi kualitas kader yang disiapkan oleh partai, baik untuk mengisi jabatan kepengurusan di internal partai maupun dalam rangka mengisi jabatan publik di luar partai, di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, di tingkat nasional dan daerah. Semakin tinggi kualitas sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai maka semakin baik pula kualitas kader yang dinominasikan partai untuk jabatan politik di dalam dan di luar partai.

Sebaliknya, semakin buruk kualitas kaderisasi yang dilakukan partai maka semakin tidak siap pula partai menyuplai kandidat kader dari internal partai untuk mengisi jabatan publik. Hanya saja masalahnya kesadaran elite dan segenap pimpinan partai akan urgensi kaderisasi ini dapat dikatakan sangat kurang, sehingga kaderisasi menjadi problem hampir semua partai di Indonesia.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh DPC PDI Perjuangan kabupaten Garut pada pelaksanaan kaderisasi yang telah dilaksanakan yaitu :

a. Waktu

Pelaksanaan kaderisasi pratama PDI Perjuangan kabupaten Garut dilaksanakan selama 4 hari, dalam kurun waktu pelaksanaan tersebut peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian materi yang disajikan oleh narasumber. Tetapi dalam proses tersebut kedisiplinan peserta masih rendah, karena setelah jadwal *break*, peserta tidak masuk kembali pada ruangan sesuai dengan jadwal. Bahkan ada beberapa peserta yang kembali ke ruangan saat ditengah-tengah materi berlangsung, faktor kedisiplinan terhadap waktu ini sebetulnya mengganggu khidmatnya kegiatan kaderisasi. Dengan demikian kedisiplinan peserta masih jauh dari harapan pelaksanaan kaderisasi pratama PDI Perjuangan di kabupaten Garut.

b. Sumberdaya

Kaderisasi adalah sebuah metode untuk meningkatkan kapasitas anggota menjadi kader yang memiliki loyalitas dan militansi serta kemampuan nalar kepemimpinan, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas partai untuk menjadikan partai politik yang dapat melaksanakan salahsatu fungsinya yaitu pendidikan politik.

Dalam perwujudan sebuah partai politik yang modern dan berkarakter, diperlukan sumberdaya yang mumpuni baik pada kepengurusannya maupun anggota pada umumnya. Dalam pelaksanaan kaderisasi pratama PDI Perjuangan kabupaten Garut yang sudah terlaksana, berdasarkan hasil-hasil wawancara bahwa hambatan pelaksanaan kaderisasi tersebut adalah sumberdaya pelaksana dan peserta.

Keterbatasan Sumberdaya pelaksanaan kaderisasi menjadi salah satu sebab tidak terselenggaranya kegiatan kaderisasi lapangan yang berdurasi 6 (enam) bulan, padahal inti dari kaderisasi pratama adalah kaderisasi lapangannya, yang mewajibkan setiap kader bertugas untuk melakukan pemetaan pada wilayah setingkat desa.

Hambatan lain diluar kepanitiaan yaitu, sumberdaya peserta kaderisasi yang mudah jenuh dengan penyampaian materi-materi yang tersaji, penilaian tersebut dilihat dari banyaknya peserta yang belum bisa menjawab setiap pertanyaan dari narasumber dari materi yang telah disampaikan.

DPC PDI Perjuangan kabupaten Garut berkomitmen, bahwa kaderisasi yang telah dilaksanakan akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kaderisasi berikutnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses kaderisasi pratama PDI Perjuangan Kabupaten Garut terdiri dari kaderisasi kelas dan kaderisasi lapangan. Kaderisasi kelas adalah penyampaian materi pada ruangan dengan metode kuliah dan metode dialog, waktu pelaksanaan kaderisasi kelas berlangsung selama 4 (empat) hari. Kaderisasi lapangan adalah penugasan terhadap peserta kaderisasi dilapangan untuk melakukan pemetaan sosial politik di tingkat desa/kelurahan, dengan durasi waktu selama 6 (enam) bulan.

- 2) Pelaksanaan kaderisasi pratama PDI Perjuangan Kabupaten Garut secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan tidak terlaksananya kaderisasi lapangan, yang merupakan inti dari pelaksanaan kaderisasi pratama dan merupakan satu kesatuan dengan kaderisasi kelas. Tidak terselenggaranya kaderisasi lapangan karena keterbatasan sumberdaya penyelenggara yang kurang dalam melakukan tugas monitoring terhadap peserta kaderisasi. Sehingga hakikat dari Kaderisasi Pratama PDI Perjuangan Kabupaten Garut sebagai partai kader dan partai ideologis belum memenuhi standar.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harun, R. (2006). *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukarna. (2008). *Sistem Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suryani, Y. (2018). *Sistem Politik Indonesia : Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*. Bandung: Bumi Aksara.